

**Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Covid – 19 (Studi Kasus : PT. Permodalan
Nasional Madani (Persero))**

Oleh : Dhanna Asha Audria Budi¹, Ninik Darmini²

ABSTRAK

Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi serta konsekuensi hukum dikeluarkannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid – 19 pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 telah diimplementasikan dengan baik oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 memberikan konsekuensi hukum berupa perubahan ketentuan atau addendum terhadap perjanjian pembiayaan antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan nasabah yang diberikan keringanan kredit.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, POJK, Stimulus Perekonomian Nasional, Dampak Covid – 19

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Legal Analysis of Credit Agreements Based on Financial Services Authority Regulation No.11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Covid-19 Spread (Case Study: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero))

Oleh : Dhanna Asha Audria Budi³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

Due to the Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) pandemic, the government issued Financial Services Authority Regulation No. 11 of 2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the impact of Covid-19 spread. This study aims to explore, examine, and analyze the implementation and legal consequences of the issuance of the Government issuing the Financial Services Authority Regulation No.11 of 2020 regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the impact of Covid-19 spread on PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

The empirical juridical approach was used to conduct in this thesis. The empirical legal research method is a legal research method which examines the applicable legal provisions along with the reality that occurred in the community to identify problems also up to problem resolution.

The result shows that the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 has been implemented correctly by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). The issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 provides legal consequences in the form of changes to the provisions or addendums to the financing agreement between PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) and the customers which given credit relief.

Keywords:

Credit agreement, Financial Services Authority Regulation, National Economic Stimulus, Covid-19 Impact

³ Undergraduate student in Civil Law, Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Gadjah Mada, Yogyakarta. Lecturer in Civil Law, Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.